

:: bursa ::

	Selasa (18/1)	
FTSE 100	6.045,80	1,00% ▲
Dax	7.150,05	1,02% ▲
Cac 40	4009,26	0,85% ▲
Dow Jones	11.787,38	0,47% ▲
Nasdaq	2.755,30	0,73% ▲
Shanghai	2.708,98	0,09% ▲
Hang Seng	24.154,00	0,01% ▼
Nikkei	10.518,98	0,15% ▲
Straits Times	3.245,28	0,21% ▲
BEI	3.548,65	0,36% ▲

Sumber: BBC dan Limas sampai 17.30 WIB

:: kurs ::

	Selasa (18/1)	
	BELI	JUAL
AUD	8.470	9.472
EUR	11.159	12.475
GBP	13.167	14.720
HKD	1.093	1.222
JPY	102	114
SGD	6.568	7.347
USD	8.494	9.494

Sumber: eTrading Securities sampai 17.30 WIB

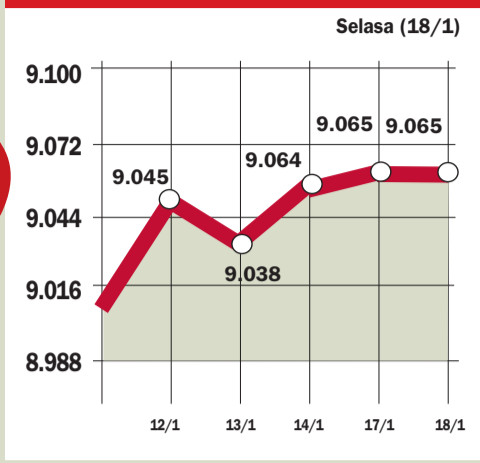
:: indikator ::

Target Ekspor Alas Kaki Naik 20 Persen

Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor alas kaki pada 2011 sebesar 2,4 miliar dolar AS. Kenaikan sebesar 20 persen dari 2010 ini menyasar pasar-pasar ekspor non-tradisional seperti Timur Tengah yang kian berkembang. Selain itu perekonomian Eropa dan AS yang membaik juga dinilai akan mendorong ekspor alas kaki.



:: kurs tengah dolar AS ::



Inflasi Ancam Ekonomi 2011

BUMN Siapkan Dua Opsi Kelola Inalum

Fitria Andayani

Bank sentral dihadapkan pada opsi menaikkan suku bunga.

JAKARTA — Proyeksi perekonomian Indonesia pada 2011 diprediksi menghadapi tantangan yang lebih rumit ketimbang tahun lalu. Kendati demikian, secara umum Indonesia masih menarik perhatian investor.

Direktur dan Ekonom Senior Global Markets Research Deutsche Bank, Taimur Baig, mengatakan bahwa tahun 2011 terdapat beberapa kondisi yang memberatkan perekonomian Indonesia. Inflasi pada tahun ini, menurut dia, salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia, juga negara-negara Asia lainnya.

"Tingkat inflasi di Asia akan meningkat," ujarnya, Selasa (18/1). Mengaca pada dua negara yang menjadi pilar Asia yaitu Cina dan India, pertumbuhan ekonomi di dua negara tersebut akan tetap tinggi seperti tahun lalu. Namun, tingkat inflasi di kedua negara itu juga meningkat.

Ia memprediksi, tekanan inflasi dan situasi ekonomi global pada akhirnya akan memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate. Kebijakan yang dirasa tidak populer tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah risiko ekonomi yang bakal dirasakan Indonesia pada 2011.

Bila kondisi inflasi tidak ditangani dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, dikhawatirkan Indonesia bisa menghadapi inflasi jangka panjang. "Indikasi peningkatan inflasi sudah terjadi sejak pertengahan 2010," tuturnya. Kemungkinan Indonesia akan menghadapi tekanan inflasi yang lebih besar lagi sangat terbuka.

Keadaan ini harus dikombinasikan dengan kebijakan penentuan harga dan subsidi perencanaan. Selain itu, penyebaran biaya harus dilakukan lebih baik



Tantangan Ekonomi Indonesia 2011 Versi Deutsche Bank

- Permintaan sektor manufaktur tidak dapat diantisipasi dengan infrastruktur memadai
- Tekanan inflasi tinggi, akan menembus 7,8 persen (year on year) pada April 2011
- Suku bunga BI akan naik menjadi 7,5 persen kuartal II 2011
- Aliran *capital inflow* masih terus masuk
- Ekspor menghadapi tantangan dengan prediksi nilai tukar Rp 8.700 per dolar AS di akhir 2011

Sumber: Deutsche bank

untuk menjaga momentum pertumbuhan. Oleh sebab itu, pengelolaan likuiditas harus diperkuat.

Lebih lanjut, pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar akan menghadapi tantangan pada 2011. Di sisi lain, harga-harga komoditas meningkat tajam. Inflasi diprediksi mencapai lebih dari tujuh persen. Rupiah akan terapresiasi lebih lanjut hingga di

KESIAPAN INFRASTRUKTUR

Dua pekerja sedang memasang pemberat pada crane di sebuah proyek properti di Jakarta, Selasa (18/1). Direktur dan Ekonom Senior Global Markets Research Deutsche Bank, Taimur Baig, menegaskan kenaikan permintaan yang tidak ditopang infrastruktur akan menghambat perekonomian 2011.

bawah Rp 8.900.

Utang jangka pendek masih banyak dan akan memberikan risiko yang cukup tinggi. Cadangan devisa memang cukup. Namun, bila mata uang asing lain meningkat dan nilai rupiah turun, cadangan devisa akan tidak mampu menutupi nilai utang. "Makanya, diperlukan usaha untuk memperbarui perjanjian utang," katanya.

Outlook jangka menengah yang positif juga dilontarkan lembaga finansial Goldman Sachs. Perusahaan ini memasukkannya Indonesia dalam kelompok kekuatan ekonomi baru perekonomian du-

nia bersama Filipina, Korea Selatan, dan Meksiko. Investor asing memandang Indonesia telah berbeda dan iklim investasi mulai membaik.

Ekonom Goldman Sachs Gym O'Neil berpendapat bahwa Indonesia sudah masuk jajaran kelompok baru calon kekuatan ekonomi. Dalam prediksinya, Goldman Sachs memperkirakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh pada 2050. Prediksi senada yang pernah dilontarkan Standard Chartered yang menyebutkan Indonesia akan masuk 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030. ■ ed: wulan tunjung palupi

:: rasio ::

Semua Ingin Potongan Kue Newmont Nusa Tenggara

Oleh Wulan Tunjung Palupi

Saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) bagaikan kue hangat yang diperebutkan pembeli. Semuanya ingin mendapat bagian. Pemerintah pusat maupun pemerintah Nusa Tenggara Barat masing-masing berpendapat merekalah yang berhak membeli tujuh persen divestasi saham NNT.

Pemerintah pusat yang sebelumnya semangat menyatakan bahwa tujuh persen saham itu akan dibeli melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), belakangan tak nyaring bersuara. PIP pun pernah menyatakan sudah mendapat mandat dari pemerintah untuk mengambil alih saham dengan nilai sekitar 270 juta dolar.

Di sisi lain, Pemprov NTB menyatakan tak mau mundur atas hak mereka membeli saham tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majidi beralasan, pemerintah pusat telah mendapat banyak keuntungan dari keberadaan NNT. Menurutnya, kini saatnya bagi pemerintah daerah yang kecipratan rezeki saham perusahaan tambang itu. Namun rupanya, pemerintah pusat belum memberikan sinyal positif bagi kemauan Pemerintah NTB.

Puncaknya terjadi pada Kamis (13/1) lalu. Saat itu, kapal milik NNT yang memuat 1.382,64 ton konsentrat dilarang meninggalkan Pelabuhan Benete di Sumbawa Barat. Alasannya, kapal tersebut belum mengantongi surat keterangan asal barang dari Bupati Sumbawa Barat.

Kapal yang seharusnya sudah berlayar menuju Brusbuttle, Jerman pun akhirnya terkatung-katung selama empat hari di pelabuhan. Perusahaan harus menanggung biaya akibat keterlambatan itu.

Di Jakarta, Kementerian ESDM telah melayangkan surat kepada pemerintah setempat bahwa tindakannya menunda pemberangkatan kapal berdampak buruk bagi citra investasi di Indonesia.

Jika Pemda NTB berhasil membeli tujuh persen saham Newmont, total pemerintah daerah memiliki 24 persen saham yang secara bertahap diperoleh sejak 15 Maret 2010. Namun, saham itu tidak seluruhnya dimiliki Pemda NTB. Mereka menggandeng Multicapital, anak usaha PT Bumi Resources Tbk sebagai pemodal.

Dana bagi hasil yang didapat Pemda NTB dari royalti per tahunnya sekitar Rp 25 miliar. Jumlah itu dibagi-bagi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah penghasil, juga untuk sembilan kabupaten/kota. Setelah mendapat porsi saham 24 persen, Pemprov mendapat tambahan pendapatan dari deviden sebesar Rp 85 miliar. Sebagai daerah penghasil, mereka merasakan adanya ketidakadilan.

Terlepas dari urusan saling klaim itu, hak atas divestasi saham NNT ini selayaknya tidak menjadi preseden buruk bagi wajah investasi Indonesia. Keluhan kalangan usaha soal tak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah pun sudah seringkali terdengar. Di saat negara-negara tetangga sudah melangkah lebih jauh untuk meningkatkan daya saingnya, amat disayangkan jika Indonesia masih berputar dengan tarik-menarik antara pusat dan daerah.

Padahal, tanpa tarik-tarikan pusat-daerah itu pun, masalah yang kita hadapi untuk mengejar daya saing sudah menumpuk. Masalah infrastruktur, perizinan, pungutan liar, dan berbagai masalah lainnya membelenggu kita untuk lebih banyak menarik investasi. ■

E-MONEY

Pekerja menggesek kartu debit pada mesin Electronic Data Capture di sebuah mal di Jakarta, Selasa (18/1).

Bank Indonesia mencatat penggunaan uang elektronik alias *e-money* di 2010 mencapai 26,4 juta transaksi atau meningkat 51,4 persen dibanding 2009.



YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Bea Masuk Impor Nonpangan Ditinjau

Shally Pristine

JAKARTA — Pengusaha meminta pemerintah menunda penerapan pengenaan bea masuk (BM) bagi impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan industri. Pemerintah pun menjanjikan akan meninjau ulang kebijakan bea masuk nonpangan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, mengungkapkan kekawatiran sektor manufaktur jika kebijakan ini diterapkan. Daya saing industri manufaktur yang masih lemah menjadi alasan ketaksiapan pengusaha atas aturan pemerintah ini.

Kadin akan mengirimkan surat mengenai keberatan itu dan meminta Kementerian Keuangan penangkuhan penerapan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/2010 yang berlaku sejak 22 Desember tahun lalu. "Hari ini suratnya akan diajukan," katanya di Jakarta, Selasa (18/1).

Dari hasil pertemuan dengan pelaku industri, ia mengungkapkan rata-rata menyatakan keberatan dengan pengenaan BM, terutama bagi impor bahan baku dan mesin. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian, Riset, dan Teknologi, Bambang Sujagad, mengatakan, PMK tentang Penetapan Sistem

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor itu tidak mencerminkan keberpihakan pada industri nasional. Dia mencontohkan, akibat penerapan PMK itu impor bahan baku dikenai bea yang lebih tinggi dari barang jadi, membuat produk lokal tak kompetitif.

Bambang mengatakan, peraturan itu juga memiliki kejanggalan lain, antara lain pengenaan BM bagi impor pupuk dan bahan pangan seperti gandum. Padahal, menurut dia, pengenaan BM bagi kedua komoditas itu akan berdampak langsung kepada pangan, baik di sisi produksi maupun konsumsi. "Pupuk juga dikenai pajak, jarang sekali ada negara di dunia memajaki pupuk," ucapnya.

Ditemui terpisah, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, pernah mengatakan, pengenaan BM atas impor barang modal dan bahan baku merupakan bagian dari peta jalan (road map) yang ditetapkan pada 2005. Kemudian, peta jalan itu secara otomatis memberlakukan kenaikan tarif BM sesuai jadwal, tanpa melihat kondisi industri terkini.

Hidayat mengatakan, dari perspektif kementeriannya, kebijakan BM mesti mencakup tiga aspek. Yakni, perbaikan daya saing nasional, perlindungan terhadap industri domestik, dan sumber pendapatan negara. Ia pun menjanjikan akan meninjau ulang pos tarif PMK nomor 241/2010 untuk produk nonpangan. ■ ed: wulan tunjung palupi